



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. KOTAWARINGIN BARAT**

**RENCANA KERJA
(RENJA)
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jalan Sultan Syahrir Nomor 2B Telp (0532) 28064 Fax (0532) 23053

Web : www.dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id

Email : dpmptspkabur@gmail.com



**RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DPMPTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
Jalan Sutan Syahrir Nomor 2 B Telpon (0532) 28064 Fax (0532) 23057
PANGKALAN BUN – KALIMANTAN TENGAH 74112
Website : simdpmptsp.Kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahun 2023 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan juga berperan sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Renja juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dan juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang.

Meskipun telah berupaya semaksimal mungkin, kami menyadari sepenuhnya bahwa tak ada gading yang tak retak. Oleh sebab itu saran dan kritik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan demi kesempurnaan agar penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Pangkalan Bun, Agustus 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 196501051994031010

**DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	10
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	41
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	42
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	43
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.....	65
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	65
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	66
3.3. Program dan Kegiatan.....	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	82
BAB V PENUTUP.....	88



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

Rencana Kerja adalah Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, merupakan rencana pembangunan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang merupakan amanat pasal 25 ayat (1) Perpres Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Masyarakat, maka sebagai wujud nyata dari sikap aparaturnegara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, antara lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sesuai dengan kebijakan otonomi daerah upaya untuk meningkatkan kinerja aparaturnegara dalam penyelenggaraan pelayanan publik terus dilakukan. Karena itu diperlukan terobosan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan tidak hanya dengan menata ulang prasarana fisik dan proses pengelolaan pelayanan, tetapi lebih jauh lagi mengejar sasaran kinerja yang dapat terukur antara lain : kecepatan, kemudahan akses, kapasitas orang yang dilayani, kualitas dokumen dan pemutakhiran data. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara simultan, maka kuantitas dan kualitas pelayanan akan segera dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan dalam bidang perizinan, di mana kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima setiap saat secara cepat, tepat, transparan, murah dan sederhana. Dalam hal ini kepuasan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah.

Schubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengambil langkah dan kebijakan menyangkut Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu dengan dibentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kewenangan yang ada yaitu tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :



➤ **Tugas Pokok :**

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

➤ **Fungsi :**

- Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;
- Identifikasi sumber – sumber potensial daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah;
- Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan dan non perizinan;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki prioritas pembangunan di Tahun 2023, antara lain :

1. Peningkatan pemerataan infrastruktur untuk mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat dan daerah.
2. Mendorong pemulihan pariwisata dan kemandirian dunia usaha melalui penguatan sumber daya lokal dan kemudahan berusaha.
3. Mendorong hilirisasi produk unggulan daerah untuk nilai tambah produk dan diversifikasi ekonomi yang berbasis kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkesinambungan, dengan mengutamakan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat pascapandemi covid-19, berbasis green growth.



1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- n. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- o. Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
- p. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- v. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
- w. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis;
- x. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi Pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- z. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
- aa. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- a. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi unit-unit bidang organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai target yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal demi pencapaian tujuan organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi.
4. Sebagai dasar pijakan/rujukan dalam menyusun RKA SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Sebagai suatu dokumen perencanaan untuk referensi penilaian tahunan terhadap hasil capaian kerja tahun sebelumnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.



1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja DPMPTSP Kab. Kotawaringin Barat tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan menyusun renja DPMPTSP sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra DPMPTSP berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja DPMPTSP tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum



mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing, dengan format Tabel T-C.30

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai proses RKPD;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan melalui pelaksanaan musrenbang kabupaten (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPMPTSP.

3.3. Program dan Kegiatan, Berisikan penjelasan mengenai:

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Rancangan Akhir Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.

Evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik makro dan mikro maupun kebijakan dan pelaksanaan, menyelaraskan program dan perencanaan serta tercapainya efektifitas perencanaan.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun lalu (n-2) / Tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) tahun 2022, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Ranwal Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 mengelola sebanyak 6 program dengan 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;



- 8) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - a. Pengadaan Mebel;
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 9) Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 10) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan kegiatan :

- 1) Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan ;
 - a. Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 2) Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan;
 - a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota.

III. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan :

- 1) Penyelenggaraan promosi yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
 - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.

IV. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan :

- 1) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan :



- a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
- c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Modal, dengan kegiatan :

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

VI. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan sub kegiatan :

- 1) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan sub kegiatan :
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Capaian Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan terdapat perbedaan program/kegiatan pada tahun 2020 dengan tahun 2021, di mana program/kegiatan pada tahun 2020 berjumlah 8 program dan 34 kegiatan. Sementara itu, sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 maka pada tahun 2021 DPMPTSP memiliki 6 program dengan 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

Adapun Capaian Kinerja Realisasi Anggaran dan Capaian Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.



Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Kotawaringin Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Hasil Program dan Keluar an Kegiatan n s/d dengan Tahun (n-3)/ Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Hasil Program dan Kegiatan n (Renja Perangk at Daerah Tahun n-1)/ Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah (n- 2)/ Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n- 2)/ Tahun 2021	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat capaian Realisa si Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+ 9)	11=(10/ 4)
2.12.01	Urusan Penanaman Modal									
2.12.2.12.01. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemuhan pelayanan administrasi perkantoran		100						
2.12.2.12.01.0	Penyediaan Jasa	Jumlah paket/		100						



1.01	Surat Menyurat	surat yang terkirim								
2.12.2.12.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100							
2.12.2.12.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	100							
2.12.2.12.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	100							
2.12.2.12.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor	100							
2.12.2.12.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	100							
2.12.2.12.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang disediakan	100							
2.12.2.12.01.01.11	Penyediaan barang cetakan	Jumlah Barang Cetak dan	100							

2.12.2.12.01.0 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pengadaan yang disediakan	Jumlah	100																
2.12.2.12.01.0 1.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan yang disediakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100																
2.12.2.12.01.0 1.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pengadaan yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	100																
2.12.2.12.01.0 1.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pengadaan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan																	
2.12.2.12.01.0 1.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pengadaan yang disediakan	Jumlah orang makanan dan minuman	100																
2.12.2.12.01.0 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan	Pengadaan yang disediakan	Jumlah Rapat-rapat	100																



	konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah								
2.12.2.12.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 %							
2.12.2.12.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun								
2.12.2.12.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang diadakan								
2.12.2.12.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	100							
2.12.2.12.01.02.09	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara								
2.12.2.12.01.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah mebeleur yang diadakan	100							
2.12.2.12.01.02.10	Pengadaan Peralatan Gedung	Jumlah Peralatan								



Tahun 2023

2.12.2.12.01.0 2.15	Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional	Gedung kantor yang diadakan Jumlah Kendaraan Dinas/ operasional yang dipelihara	100								
2.12.2.12.01.0 2.24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/ Berkala									
2.12.2.12.01.0 2.27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/ Berkala	100								
2.12.2.12.01.0 2.28	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dirchabilitasi sedang/berat	100								
2.12.2.12.01. 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									



2.12.2.12.01.0 5.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100						
2.12.2.12.01. 06	Program peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100,00 %						
2.12.2.12.01.0 6.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100						
2.12.2.12.01.0 6.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	100						
2.12.2.12.01.0 6.04	Penyusunan pelaporan	Jumlah laporan keuangan akhir	100						



	keuangan akhir: tahun	tahun yang disusun								
2.12.2.12.01. 15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Peningkatan jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat	2,20%							
2.12.2.12.01.1 5.10	Kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah pameran tingkat daerah dan tingkat nasional yang diikuti	100							
2.12.2.12.01.1 5.13	Kegiatan Penyusunan bahan media informasi Penanaman Modal	Jumlah jenis media promosi yang disediakan	100							
2.12.2.12.01.1 5.14	Kegiatan Pengelolaan Aplikasi dan publikasi informasi Promosi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	100							
		Jumlah Jenis Publikasi Informasi DPMPTSP								



2.18.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
2.18.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
2.18.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
2.18.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	13 Dokumen	8 Dokumen	100				
2.18.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	1 Dokumen	100				
2.18.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi	100%	100%	100%				



2.18.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	28 Jenis		22 Jenis	22 Jenis	100		
2.18.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan	14 Jenis		14 Jenis	14 Jenis	100		
2.18.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	1 Jenis		11 Jenis	11 Jenis	100		
2.18.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis		7 Jenis	2 Jenis	100		
2.18.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	8 Orang		5 Orang	5 Orang	100		



2.18.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%		
2.18.01.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelur yang diadakan	8 Buah	0	0	0		
2.18.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	10 Unit	8 Unit	8 Unit	100		
2.18.1.2.07.9	2.18.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan						
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	93,19%	93,19%		
2.18.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah paket/surat yang terkirim	22 Paket	25 Surat/paket	0	0		
2.18.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100		



2.18.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	100%	100%	7 Unit	7 Unit	44 Unit	44 Unit	100		
		Jumlah Jasa Pelayanan umum Kantor yang disediakan													
2.18.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	7 Unit	7 Unit	44 Unit	44 Unit	100		
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan													
2.18.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	7 Unit	7 Unit	100	7 Unit	100%	100%	7 Unit	7 Unit	44 Unit	44 Unit	100		
		Jumlah perlatan dan mesin lainnya yang dipelihara													
2.18.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor	41 Unit	41 Unit											
		Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor													
2.18.1.2.09.9	2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit											



	Kantor dan Bangunan Lainnya	yang dipelihara Rutin/ Berkala																				
2.18.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	100%	175%	175%																	
2.18.2.2.01	Penetapan Pemberian fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	175%																
2.18.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Dokumen	175%																



2.18.2.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	100%	100%	100%	100%			
2.18.2.2.02.1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rancangan Produk Hukum Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
2.18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemetaan potensi dan peluang Penanaman Modal daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100				
2.18.3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	2,43%	1,52%	1,52%				
2.18.3.2.01	Penyelenggaraan Promosi	Persentase Promosi	2,43%	1,52%	1,52%				



	Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal yang dilaksanakan																	
2.18.3.2.01.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah aplikasi/website yang dikembangkan/dibuat	2 Aplikasi/Website	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100													
		Jumlah jenis publikasi informasi DPMPTSP	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100													
2.18.3.2.01.2		Jumlah pameran tingkat daerah dan tingkat nasional yang diikuti	1 Jenis	2 Jenis	1 Jenis	50													
			1 Kali																
2.18.4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang diterbitkan	98%	98%	105%	105%													



2.18.4.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Perizinan yang diterbitkan	98%	105%	105%			
2.18.4.2.01.1	Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan usaha	Jumlah Permohonan Perizinan Berusaha yang Disetujui Melalui OSS	950 Buah	1.162 Buah				
2.18.4.2.01.2	Kegiatan peningkatan pelayanan perizinan tertentu dan non perizinan	Jumlah Dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang Diterbitkan	950 Buah	1.020 Buah				
2.18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap	Jumlah Pengaduan yang ditangani	2 Kali	2 Kali	100			



	Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	2 Kali	3 Buah	3 Buah	3 Buah	100				
2.18.5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN MODAL	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	64,29%	60,00%	63%						
2.18.5.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	64,29%	2 Jenis	2 Jenis						
2.18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan data PMA/PMDN perizinan dan non perizinan	100 Perusahaan	25 Perusahaan	32 Perusahaan						



2.18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan pelaksanaan penanaman modal	180 OK					191 OK	
2.18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan, penanaman modal dan perizinan	100 Perusahaan					75 Perusahaan	92 Perusahaan
2.18.6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	64,29%						
2.18.6.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	64,29%					1 Dokumen	1 Dokumen



2.18.6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan data PMA/PMDN perizinan dan non perizinan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen				
---------------	--	--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Tabel 2.1
 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat
 Tahun (N-2)/ Tahun Anggaran 2021

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	TOTAL PAGU ANGGARAN DPMPPTSP	5.125.702.281	4.978.249.135	97,12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.523.937.261	4.479.519.418	99,02
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.839.150	5.766.650	99,66
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	339.700	487.200	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	887.500	887.500	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKAS-SKPD	920.050	900.050	100
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.249.850	1.249.850	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	812.350	812.350	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKP	454.800	454.800	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	974.900	974.900	100
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.037.184.060	4.010.602.210	99,34
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.993.713.000	3.917.107.995	98,08
9	Pelaksanaan Pemertanahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP	40.949.750	40.574.880	99,08
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.408.800	1.407.750	99,93
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.112.500	1.112.500	100,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.943.050	9.942.200	100,00
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0,00
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.943.050	9.942.200	100,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.724.269	68.305.199	98,42
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.250.740	5.250.740	100,00
15	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	13.545.554	13.545.554	100,00
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.172.739	4.197.748	81,15
17	Penyediaan Transportasi	11.763.236	11.763.236	100,00



		Kantor			
	18	Penyediaan Barang Cetak dan Pengerjaan	16.206.969	16.206.969	100,00
	19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.192.955	20.918.866	98,71
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.398.272	95.220.000	100,00
	20	Pengadaan Mebel	0	0	0,00
	21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.398.272	95.220.000	100,00
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227.399.000	211.923.319	93,19
	23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	770.000	0	0,00
	24	Penyediaan Jasa Keamanan, Sumber Daya Air dan Listrik	113.152.800	99.530.618	87,96
	25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	113.476.200	112.392.701	99,08
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.449.470	57.759.840	98,82
	26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.699.470	23.009.840	97,09
	27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.750.000	34.750.000	100,00
B		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	38.665.350	36.733.600	95,00
VIII		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dihadang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	20.965.500	19.734.400	94,13
	28	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	20.965.500	19.734.400	94,13
IX		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	17.699.850	16.999.200	96,04
	29	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	7.693.650	7.693.000	99,99
	30	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	10.006.200	9.306.200	93,00
C		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	101.743.550	99.405.342	97,70
X		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	101.743.550	99.405.342	97,70
	31	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	73.943.550	73.385.342	99,11
	32	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	27.800.000	26.120.000	93,96
D		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN	100.000.000	101.000.000	101,00



XI	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pinta dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		103.052.000	101.255.310	98,26
	33	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	45.193.100	44.238.880	97,89
	34	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	44.002.900	43.160.680	98,09
	35	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	13.856.000	13.855.750	100,00
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		351.179.850	254.771.215	72,55
XII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		351.179.850	254.771.215	72,55
	36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.799.750	36.870.785	74,04
	37	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	194.773.300	183.303.630	94,11
	38	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	106.606.800	34.596.800	32,45
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		7.124.250	6.564.250	92,14
XIII	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		7.124.250	6.564.250	92,14
	39	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	7.124.250	6.564.250	92,14
	TOTAL PAGU ANGGARAN		5.125.702.281	4.978.349.135	97,12

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Capaian Kinerja Realisasi Anggaran s/d tanggal 31 Desember 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :
Ringkasan capaian masing-masing program sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, sebesar 99,02 %;
2. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran program pengembangan iklim penanaman modal , sebesar 95,00 %;
3. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Program promosi penanaman modal , sebesar 97,70 %
4. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Program pelayanan penanaman modal, sebesar 98,26%



5. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Program pengembangan pelaksanaan penanaman modal, sebesar 72,55 %
6. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sebesar 92,14%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan. Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peningkatan kualitas adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum maksimalnya pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;



4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah DPMPTSP
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun Anggaran 2021

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2019 (Th. n-3)	Tahun 2020 (Th. n-2)	Tahun 2021 (Th. n-1)	Tahun 2022 (Th. n)	Tahun 2023 (Th. n+1)	Tahun 2019 (Th. n-3)	Tahun 2020 (Th. n-2)	Tahun 2021 (Th. n-1)	Tahun 2022 (Th. n)	Tahun 2023 (Th. n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Rata-rata survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik (Survey IKM)			90	95	96	99			89,91	90		95	96	
2	Realisasi investasi (PMA dan PMDN)			6.466,667 juta	6.607,640 juta	6.752,348 juta	6.900,899 juta			6.078,333 juta	6.078,333 juta		6.607,640 juta	6.752,348 juta	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan penjangkauan perangkat daerah			80	80	80	80			94,23	97,03		90	90	
4	Nilai SAKIP perangkat daerah			71	81	81	81			70,98	75,27		81	72	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya.



Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/lokal provinsi. Untuk isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan internal dan eksternal, antara lain meliputi:

1. Belum optimalnya perangkat daerah dalam melaksanakan promosi penanaman modal (investasi);
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi yang telah berjalan selama ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat masih menghadapi beberapa permasalahan yang dirasakan cukup menjadi kendala bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP diantaranya :

1. Perlambatan investasi dan aktivitas ekonomi dampak covid 19;
2. Akurasi data kurang optimal, monitoring penyelenggaraan pengelolaan data penanaman modal dan perizinan tidak memiliki kendali (Data Base);
3. Promosi Investasi belum optimal sehingga Kotawaringin Barat belum menjadi Brand tujuan Investasi Nasional;
4. Belum optimalnya peta potensi investasi;
5. Belum optimal proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal;
6. Regulasi berubah-ubah sehingga menghambat perizinan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah :

1. Menambah jumlah personil/ Pegawai guna peningkatan pelayanan;
2. Melakukan terobosan inovasi dalam aktivitas promosi;
3. Melakukan pembaharuan (*update*) data;
4. Melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui kemudahan mengurus izin secara online.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pengelolaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pada penyelesaian permasalahan isu-isu strategis tersebut. Sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) penunjang pada RKPD Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu :

1. Realisasi Investasi penanaman modal;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).



Adapun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2023 Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2023, sebagai berikut :

2	1	8	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2	Dokumen	2.499.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	2.500.000,00
2	1	8	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2	Dokumen	2.499.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	2.500.000,00
2	1	8	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	2	Dokumen	1.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	1.750.000,00
2	1	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	13	Laporan	47.875.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	50.000.000,00



Tahun 2023

2	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	1 Laporan	53.485.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	45.000.000,00
2	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	25 Laporan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	1.500.000,00
2	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						75.494.000,00				79.930.000,00
2	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	36 Paket	21.978.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	23.870.000,00

Tahun 2023

2	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	5 Orang		53.516.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	100%	56.060.000,00
2	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							222.723.031,00				269.797.528,05
2	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	8 Paket		7.929.596,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	100%	7.500.000,00
2	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	22 Paket		57.927.193,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	100%	53.000.000,00
2	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	93 Paket		7.129.766,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	100%	4.100.000,00
2	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	11 Paket		-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase capaian peninjauan Perangkat Daerah	100%	400.000,00

Tahun 2013

2	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Paket	48.785.476,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	69.978.730,00
2	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	8 Laporan	100.951.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	134.818.798,05
2	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										170.000.000,00
2	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	15 Buah	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	70.000.000,00
2	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	25 Unit	94.505.677,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	100.000.000,00
2	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	1 Unit	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	-
2	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										309.797.378,00
															325.770.000,00

Tahun 2023

2	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	12 Laporan	350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	770.000,00
2	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Serua Kelurahan	100%	12 Laporan	133.860.378,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	155.000.000,00
2	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	12 Laporan	175.587.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	170.000.000,00
2	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						277.997.751,00			335.000.000,00	
2	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	7 Unit	44.072.751,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	45.000.000,00

Tahun 2023

2	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperkirakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	62 Unit	34.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	40.000.000,00
2	1	1	2.09	9	2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperkirakan/Direhabilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	1 Unit	198.875.000,00	250.000.000,00		Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah		250.000.000,00
2	1	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						156.834.200,00				315.000.000,00
2	1	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kerentangan Daerah Kabupaten/Kota						116.834.200,00				150.000.000,00
2	1	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	2 Dokumen	116.834.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	100%	150.000.000,00
2	1	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						155.615.000,00				165.000.000,00

Tahun 2023

2	1	2	2.02	1	Perencanaan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	100%	1	Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	100%	100.000.000,00
2	1	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL											
2	1	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Perentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	90%	0		235.199.750,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Perentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	92%	235.000.000,00
2	1	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Jumlah Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Maharejo	90%	1	Dokumen	235.199.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Perentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	92%	235.000.000,00

		Kota												
2	1	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL										134.999.950,00	150.000.000,00
2	1	4	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota										134.999.950,00	150.000.000,00
2	1	4	2.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	98%	500 Pelaku Usaha	53.130.750,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui	98%	65.000.000,00
2	1	4	2.01	Pemantauan Pemecuban Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemecuban Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	98%	500 Kegiatan Usaha	73.450.200,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui	98%	65.000.000,00

Tahun 2023

2	1	4	2.01	3	Perencanaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Perentase Perizinan yang diterbitkan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kutawaringin Barat, Serta Kecamatan, Serta Kelurahan	98%	500 Orang	8.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui	98%	20.000.000,00
2	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						428.371.000,00				200.000.000,00
2	1	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						428.371.000,00				200.000.000,00
2	1	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang melaporakan LKPM tepat waktu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanaman Modal	Kab. Kutawaringin Barat, Arut Selatan, Madiarejo	64,29 %	200 Kegiatan Usaha	97.180.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan perusabaan yang melaporakan LKPM tepat waktu	64,29%	50.000.000,00
2	1	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang melaporakan LKPM tepat waktu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kutawaringin Barat, Arut Selatan, Madiarejo	64,29 %	180 Pelaku Usaha	253.646.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan perusabaan yang melaporakan LKPM tepat waktu	64,29%	100.000.000,00

Tahun 2023

2	1	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	64,29 %	200 Kegiatan Usaha	77.545.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	64,29%	50.000.000,00
2	1	6	2.01	3	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL.										
2	1	6	2.01	3	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
2	1	8	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayan Berasas Terintegrasi secara Elektronik	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola.	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dilaji dan Dimanfaatkan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	64,29 %	1 Laporan	44.506.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	64,29%	120.000.000,00
											6.767.959.425,00			7.018.497.528,05	
TOTAL															



2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai tindak lanjut dari target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mengusulkan beberapa program guna mendukung tercapainya target kinerja tersebut. Adapun Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat yang diusulkan pada Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Tabel T-C. 32.

Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	DPMPTSP	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	



3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3500 Dokumen	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMPTSP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3500 Dokumen	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	



			Keuangan Akhir Tahun SKPD		
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	DPMPTSP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DPMPTSP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	78 Paket	
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Luar Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang/Kali	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMPTSP	Jumlah jenis administrasi umum yang disediakan	7 Jenis	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPMPTSP	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	93 Paket	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMPTSP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	



5.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	DPMPTSP	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	10 Paket	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi dan luar provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Orang	
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan yang disediakan	51 Unit	
1.	Pengadaan Mebel	DPMPTSP	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	
3.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1 Unit	
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kotawaringin barat, Provinsi dan luar provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	



1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DPMPTSP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Persentase Minat Investasi	90%	
VIII	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	2 Dokumen	
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	
IX.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Tersedianya Peta Potensi dan Peluang Investasi	2 Dokumen	
1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kobar	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kobar	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	



C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	
X.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	6 Media Promosi	
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Persentase Perizinan yang diterbitkan	98%	
XI.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Kobar	Jumlah izin dan non izin, pemantauan pemenuhan komitmen dan pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang dapat diselesaikan	1500 Buah	
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kobar	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Kegiatan Usaha	



3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Orang	
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	71%	
XII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jenis layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	2 Jenis	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha	
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	180 Pelaku Usaha	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan Usaha	
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	60%	
XIII	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah		Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	12 Laporan	



	Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	1 Dokumen	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.” Visi dan misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan 2 (dua) arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanaman modal (investor needs).
 - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing.
 - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal.
 - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal.
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal.



- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan pelaksanaan penanaman modal.
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif diarahkan juga pada peningkatan kualitas penanaman modal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap.
 - b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal.
 - c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi.
 - d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar.
 - e. Meningkatkan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah **Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi, yaitu:

- ✓ Perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal daerah;
- ✓ Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal;



- ✓ Identifikasi sumber – sumber potensial daerah secara menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- ✓ Pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam rangka menarik minat penanaman modal;
- ✓ Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal dan sektor secara terpadu yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan menjadi kewenangan daerah;
- ✓ Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- ✓ Pengelolaan data dan informasi terkait penanaman modal perizinan dan non perizinan;
- ✓ Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- ✓ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023-2026 yang telah ditetapkan beberapa tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:

1. Mengoptimalkan realisasi penanaman modal;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik.

Tujuan tersebut berkaitan langsung dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam RPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Selanjutnya sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:

1. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan.

Guna mencapai Sasaran yang telah ditetapkan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat juga telah menetapkan strategi guna mencapai sasaran-sasaran tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan minat investasi melalui promosi investasi dan pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang Pelayanan Perizinan.



Agar dapat melaksanakan strategi yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menyusun kebijakan sebagai berikut:

1. Menyediakan sistem penyimpanan dan aplikasi untuk mewujudkan pengelolaan data yang terintegrasi antara petugas pelayanan dengan pengelola data.
2. Pelaksanaan Pengendalian LKPM Online.
3. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.
4. Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.
5. Penyusunan Buku Profil, Video, Baliho dan Pamflet Investasi.
6. Branding invesda adalah produk ekspor Kabupaten Kotawaringin Barat dikelola secara lestari diharapkan investor dapat akan berinvestasi pada sektor hilirisasi produk kelapa sawit yang lestari.
7. Digitalisasi peta potensi investasi.
8. Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Pengembangan SDM.
9. Pengembangan SDM.
10. Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.
11. Peningkatan Pelayanan Perizinan secara elektronik.
12. Peningkatan kegiatan sosialisasi perizinan.

Target Sasaran Kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja
1	Mengoptimalkan realisasi penanaman modal	Realisasi investasi penanaman modal	2,3 T
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
3	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	Nilai investasi PMA dan PMDN	1,5 T
4	Meningkatnya pelayanan perizinan	Persentase jenis izin yang memiliki nilai dengan kategori baik dan sangat baik	96



3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan beberapa program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tahun 2023

2	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	2.499.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	2.500.000,00
2	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	2.499.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	2.500.000,00
2	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Munturejo	100%	2 Dokumen	1.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	1.750.000,00
2	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	13 Laporan	47.875.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	50.000.000,00

Tahun 2023

2	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	1 Laporan	53.483.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	45.000.000,00
2	1	8	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	25 Laporan	1.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	1.500.000,00
2	1	8	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						75.494.000,00				79.930.000,00
2	1	8	2.05	2	Pengadaan Paketan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Paketan Dinas beserta Atribut	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	36 Paket	21.978.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	23.870.000,00

2	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madiurejo	100%	5 Orang	53.516.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	56.060.000,00
2	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						222.723.031,00				269.797.528,05
2	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madiurejo	100%	8 Paket	7.929.596,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	7.500.000,00
2	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madiurejo	100%	22 Paket	57.927.193,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	53.000.000,00
2	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madiurejo	100%	93 Paket	7.129.766,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	4.100.000,00
2	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madiurejo	100%	11 Paket	-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	400.000,00

Tahun 2023

2	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 Paket	48.783.476,00	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	69.978.730,00
2	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri	100%	8 Laporan	100.951.000,00	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	134.818.798,05
2	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										170.000.000,00
2	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Kediri	100%	15 Buah	-	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	70.000.000,00
2	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Kediri	100%	25 Unit	94.505.677,00	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	100.000.000,00
2	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	Kab. Kediri	100%	1 Unit	-	Data Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	-
2	1	1	2.08		Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah										325.770.000,00
2	1	1	2.08		Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah										309.797.378,00

Tahun 2023

2	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	12 Laporan	350.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	770.000,00
2	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Semsu Kelurahan	100%	12 Laporan	133.860.378,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	155.000.000,00
2	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	12 Laporan	175.587.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	170.000.000,00
2	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						277.397.751,00				335.000.000,00
2	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	7 Unit	44.072.751,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	45.000.000,00

2	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diperelihara	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	62 Unit	34.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	40.000.000,00
2	1	1	2.09	9	2.18.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperelihara/Di rehabilitasi	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	1 Unit	198.873.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	250.000.000,00
2	1	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
2	1	2	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
2	1	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	Jumlah Peraturan Daerah/Provisi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	2 Dokumen	116.834.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	100%	150.000.000,00
2	1	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
2	1	2	2.02		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL										
2	1	2	2.02		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota										
2	1	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
											156.834.200,00				315.000.000,00
											116.834.200,00				150.000.000,00
											116.834.200,00				150.000.000,00
											155.615.000,00				165.000.000,00

Tahun 2023

2	1	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	100%	1	Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	100%	100.000.000,00
2	1	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Semua Kabupaten/Kota, Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1	Dokumen	235.199.750,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen Perencanaan Investasi yang mendorong Pengembangan iklim penanaman modal daerah	100%	235.000.000,00
2	1	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	90%	0		235.199.750,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	92%	235.000.000,00
2	1	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	90%	1	Dokumen	235.199.750,00	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	92%	235.000.000,00

Tahun 2023

2	1	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.	Persentase Perizinan yang diterbitkan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kab. Kotawaringin Barat, Semua Kecamatan, Kalarahan	98%	500 Orang	8.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Dokumen perizinan dan non perizinan yang dapat disetujui	98%	20.000.000,00
2	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL										
2	1	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	64,29 %	200 Kegiatan Usaha	97.180.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	64,29%	50.000.000,00
2	1	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	64,29 %	180 Pelaku Usaha	253.646.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	64,29%	100.000.000,00

Tahun 2023

2	1	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	64,29 %	200 Kegiatan Usaha	77.545.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	64,29%	50.000.000,00
2	1	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						44.506.150,00	120.000.000,00			
2	1	8	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimartipkan	Kab. Kotawaringin Barat, Arut Selatan, Madurejo	64,29 %	1 Laporan	44.506.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	64,29%	120.000.000,00
2	1	8			TOTAL						6.767.959.425,00	7.018.497.528,05			

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang ada pada tiap-tiap SKPD, untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 mendapatkan kucuran dana/ pagu indikatif sebesar **Rp. 6.767.959.425,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)**, yang bersumber dari **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)** Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. Adapun prioritas Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Kegiatan dan Pendanaan yang Diusulkan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian penunjang Perangkat Daerah	100%	5.768.048.375	
L.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	126.183.950	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	66.559.800	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.499.700	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2.499.900	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	2.499.700	



		Dokumen DPA-SKPD			
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1.750.000	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	47.875.000	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2.499.850	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3500 Dokumen	4.661.946.588	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/ Bulan	4.501.461.588	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3500 Dokumen	5.500.000	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	63.485.000	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25 Laporan	1.300.000	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disediakan	2 Jenis	78.494.000	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	78 Paket	21.978.000	
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	53.516.000	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	222.729.031	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	7.329.636	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Paket	57.927.193	
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	93 Paket	7.129.766	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket	-	



5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	88.785.476	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	100.951.000	
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah yang disediakan	51 Unit	94.808.677	
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	-	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit	94.808.677	
3.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	-	-	
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	309.797.378	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	350.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.660.378	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	175.587.000	
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	3 Jenis	277.207.761	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenastaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kembaran Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	7 Unit	44.072.761	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	34.450.000	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.675.000	
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Minat Investasi	90%	166.834.200	
VIII.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum	4 Dokumen	166.834.200	
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman	2 Dokumen	116.834.200	



	Modal	Modal		
IX.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Terseledinya Peta Potensi dan Peluang Investasi	2 Dokumen	40.000.000
1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		
2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.000.000
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	90%	235.199.750
X.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang dilaksanakan	6 Media Promosi	235.199.750
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	235.199.750
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perizinan yang diterbitkan dalam Satu Tahun	98%	134.999.950
XI.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin dan non izin, pemantauan pemenuhan komitmen dan pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan melalui sistem elektronik dan non elektronik yang dapat diselesaikan	1500 Buah	134.999.950
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku usaha	53.130.750
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	500 Kegiatan usaha	73.450.200
3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	500 Orang	8.410.000



E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM tepat waktu	71%	428.371.000	
XII	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	440 Perusahaan	428.371.000	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Kegiatan Usaha	97.180.000	
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	180 Pelaku usaha	353.646.000	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	200 Kegiatan usaha	77.545.000	
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase data yang terintegrasi pada sistem Informasi Penanaman Modal yang dikelola	60%	44.506.150	
XIII.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	12 Dokumen	44.506.150	
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah data dan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi	1 Laporan	44.506.150	
		J U M L A H		6.767.959.425	

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2023 telah menetapkan sebanyak 6 Program dan 13 Kegiatan dengan total anggaran sebesar *Rp. 6.767.959.425,- (Enam Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)*. Dari enam Program Sekretariat melaksanakan 1 program rutin/ pendukung yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**, dengan 7 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan. Sedangkan untuk Bidang di DPMPPTSP melaksanakan urusan wajib Penanaman Modal dengan Program- Program, sebagai berikut:



- 1) **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** dengan 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
- 2) **Program Promosi Penanaman Modal** dengan 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;
- 3) **Program Pelayanan Penanaman Modal** dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
- 4) **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dengan 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan;
- 5) **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** dengan 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan;

Program-program tersebut merupakan program-program yang nantinya dilaksanakan oleh Bidang-Bidang yang terdapat dalam struktur nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni Bidang Promosi Penanaman Modal, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Pengawasan dan Pengendalian.



BAB V

P E N U T U P

Rencana kerja Tahun 2023 ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan pemerintah daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Pelaksanaan semua kegiatan baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bidang dan lintas bidang, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan yang disusun dalam rangka Rencana Kerja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan tergantung pada kondisi, regulasi serta ketersediaan anggaran pemerintah daerah tahun anggaran bersangkutan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik.

Pangkalan Bun, September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 196501051994031010